



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5  
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

---

Nomor : 1264/DJU/HM.02.3/12/2021 Jakarta, 8 Desember 2021  
Lampiran : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Monitoring dan Evaluasi  
Penerapan Register Elektronik  
Tahun 2021

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Tinggi  
di –  
tempat

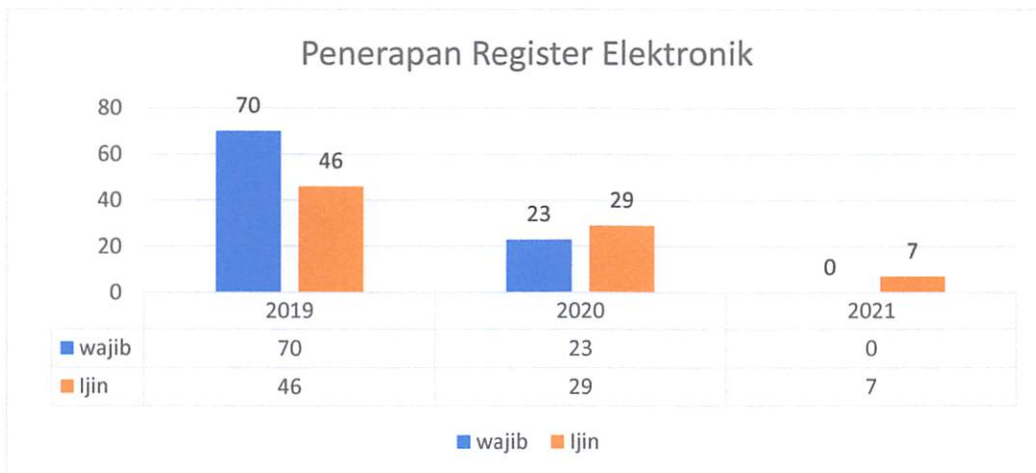
Memperhatikan hasil monitoring terhadap pelaksanaan register elektronik pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, berdasarkan evaluasi maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas Pengadilan Tinggi belum sepenuhnya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri yang akan diajukan dan sudah diberikan ijin register elektronik, untuk itu kami sampaikan hal-hal yang wajib diketahui terkait dengan penerapan register elektronik diseluruh Pengadilan Negeri, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan register elektronik diajukan oleh Pengadilan Tinggi ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan melampirkan surat jaminan Ketua Pengadilan Tinggi, setelah menyetujui usul Pengadilan Negeri dengan mempertimbangkan nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) yang telah memenuhi persyaratan yaitu:
  - a. Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara 1 – 500, dengan minimal nilai EIS sebesar 900
  - b. Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara 501 – 1000, dengan minimal nilai EIS sebesar 850
  - c. Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara 1001 – 2000, dengan minimal nilai EIS sebesar 800
  - d. Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara > 2000, dengan minimal nilai EIS sebesar 750
2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2019 dengan surat surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 232/DJU/HM.02.3/2/2019 menerapkan wajib e-register bagi 70 (tujuh puluh) Pengadilan Negeri yang rata-rata jumlah perkara per tahunnya  $\leq$  200 perkara (daftar pada lampiran I).
3. Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SIPP di tahun 2020, maka 23 (dua puluh tiga) Pengadilan Negeri yang mendapat penilaian Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) tertinggi selama 6 (enam) bulan berturut-turut diwajibkan untuk menerapkan register

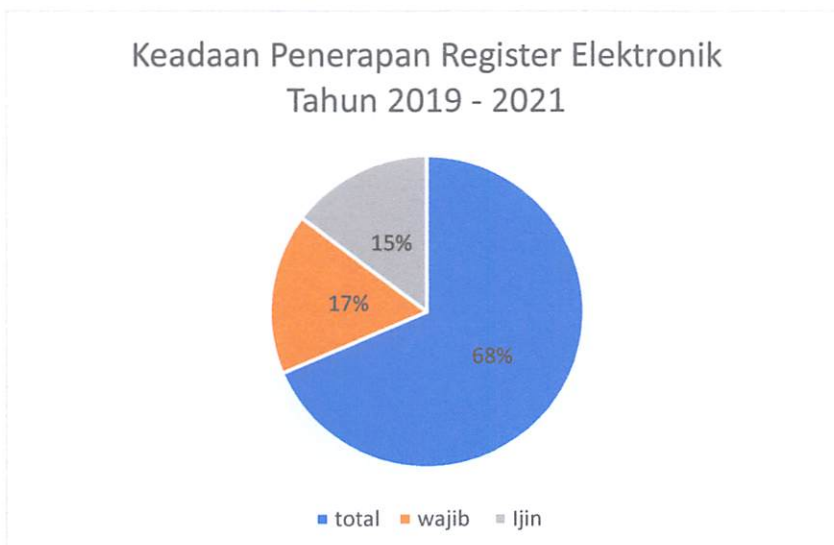
elektronik sebagaimana tertuang pada surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 433/DJU/HM.02.3/4/2020 hal Pelaksanaan Penerapan Register Elektronik (lampiran II)

4. Bagi Pengadilan Negeri yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana angka 1 di atas, dapat mengajukan permohonan penerapan register elektronik melalui Pengadilan Tinggi dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam surat Direktur Jenderal Badilum nomor 1153/DJU/HM02.3/12/2018 tanggal 14 Desember 2018.
5. Pengadilan Negeri yang sudah menerima surat izin penerapan register elektronik, diwajibkan tetap mengisi data perkara pada **register induk**, yang pelaksanaannya wajib dimonitor dan dievaluasi oleh Pengadilan Tinggi **selama setahun setelah izin diberikan**.
6. Berdasar hasil monitoring dan evaluasi oleh Pengadilan Tinggi selama setahun setelah surat izin dikeluarkan terhadap pelaksanaan register elektronik di Pengadilan-Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya, maka Pengadilan tinggi selanjutnya mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk **memberikan izin sepenuhnya meninggalkan register manual**.

Data pengadilan negeri yang telah menerapkan e-register tahun 2019-2021 :



Presentasi penerapan register elektronik pada pengadilan negeri dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada diagram berikut :



Dari diagram di atas disimpulkan 68% pengadilan negeri belum mengajukan permohonan izin atau diwajibkan untuk penerapan register elektronik, 17% pengadilan negeri diwajibkan menerapkan register elektronik dan 15% pengadilan negeri mendapatkan izin penerapan register elektronik melalui usulan Pengadilan Tinggi.

Kami sampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Pengadilan Tinggi yang sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya yaitu :

1. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
2. Pengadilan Tinggi Banjarmasin
3. Pengadilan Tinggi Palangkaraya
4. Pengadilan Tinggi Palembang
5. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Berkaitan dengan uraian di atas, dengan ini diminta kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi untuk mendorong agar seluruh Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya mengajukan ijin register elektronik dan agar Pengadilan Tinggi benar-benar melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan register elektronik terhadap Pengadilan-Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya yang sudah menerapkan register elektronik (sebagaimana daftar pada lampiran III) dengan menggunakan formulir monev sebagaimana pada lampiran IV.

Hasil monitoring dan evaluasi Pengadilan Tinggi terhadap Pengadilan Negeri dapat dikirimkan **hanya melalui email [registerelektronik.badilum@gmail.com](mailto:registerelektronik.badilum@gmail.com) dalam bentuk file excel** sesuai dengan format pada lampiran IV yang dapat diunduh pada link <https://bit.ly/monevregel2021>

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PLT DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,  
  
PRIM HARYADI

**DAFTAR PENGADILAN NEGERI DENGAN JUMLAH PERKARA < 200 WAJIB  
MENERAPKAN REGISTER ELEKTRONIK TAHUN 2019**

No.	PT	PN
1	PT TANJUNG KARANG	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN
2	PT PALANGKARAYA	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK
3	PT PALANGKARAYA	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
4	PT PALANGKARAYA	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN
5	PT PALANGKARAYA	PENGADILAN NEGERI BUNTOK
6	PT PALANGKARAYA	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
7	PT MEDAN	PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN
8	PT MEDAN	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH
9	PT SURABAYA	PENGADILAN NEGERI PACITAN
10	PT MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI SELAYAR
11	PT MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU
12	PT MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI MAJENE
13	PT MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI BELOPA
14	PT BANGKA BELITUNG	PENGADILAN NEGERI MENTOK
15	PT BANGKA BELITUNG	PENGADILAN NEGERI KOBAN
16	PT PALEMBANG	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
17	PT MANADO	PENGADILAN NEGERI MELONGUANE
18	PT BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI SABANG
19	PT BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI TAKENGON
20	PT BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG
21	PT BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI SINABANG
22	PT BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN
23	PT BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI SINGKIL
24	PT BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE
25	PT BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE
26	PT BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
27	PT BANDA ACEH	PENGADILAN NEGERI CALANG
28	PT BANJARMASIN	PENGADILAN NEGERI PARINGIN
29	PT KUPANG	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA
30	PT KUPANG	PENGADILAN NEGERI KALABAHI
31	PT KUPANG	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU
32	PT KUPANG	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
33	PT KUPANG	PENGADILAN NEGERI LEMBATA

No.	PT	PN
34	PT KUPANG	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
35	PT KUPANG	PENGADILAN NEGERI RUTENG
36	PT KUPANG	PENGADILAN NEGERI ENDE
37	PT KUPANG	PENGADILAN NEGERI BAJAWA
38	PT PEKANBARU	PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
39	PT PEKANBARU	PENGADILAN NEGERI RANAI
40	PT BENGKULU	PENGADILAN NEGERI KEPAHANG
41	PT BENGKULU	PENGADILAN NEGERI TUBEI
42	PT BENGKULU	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
43	PT BENGKULU	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO
44	PT BENGKULU	PENGADILAN NEGERI TAIS
45	PT PALU	PENGADILAN NEGERI BUOL
46	PT JAYAPURA	PENGADILAN NEGERI SERUI
47	PT JAYAPURA	PENGADILAN NEGERI FAK FAK
48	PT JAYAPURA	PENGADILAN NEGERI WAMENA
49	PT JAYAPURA	PENGADILAN NEGERI KAIMANA
50	PT SAMARINDA	PENGADILAN NEGERI MALINAU
51	PT SAMARINDA	PENGADILAN NEGERI PENAJAM
52	PT JAMBI	PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR
53	PT PADANG	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI
54	PT PADANG	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO
55	PT PADANG	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
56	PT PADANG	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING
57	PT PADANG	PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG
58	PT GORONTALO	PENGADILAN NEGERI TILAMUTA
59	PT GORONTALO	PENGADILAN NEGERI MARISA
60	PT AMBON	PENGADILAN NEGERI TUAL
61	PT AMBON	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPUPU
62	PT AMBON	PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
63	PT AMBON	PENGADILAN NEGERI NAMLEA
64	PT AMBON	PENGADILAN NEGERI DOBO
65	PT AMBON	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA
66	PT MALUKU UTARA	PENGADILAN NEGERI SANANA
67	PT MALUKU UTARA	PENGADILAN NEGERI BOBONG
68	PT KENDARI	PENGADILAN NEGERI ANDOOLU
69	PT KENDARI	PENGADILAN NEGERI LASUSUA
70	PT KENDARI	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI

**DAFTAR PENGADILAN NEGERI YANG WAJIB MENERAPKAN REGISTER  
ELEKTRONIK TAHUN 2020**

No.	PENGADILAN TINGGI	PENGADILAN NEGERI
1	PT BANDUNG	PENGADILAN NEGERI BANDUNG
2	PT BANDUNG	PENGADILAN NEGERI CIBINONG
3	PT BANDUNG	PENGADILAN NEGERI SUMBER
4	PT BANDUNG	PENGADILAN NEGERI DEPOK
5	PT BENGKULU	PENGADILAN NEGERI BENGKULU
6	PT JAMBI	PENGADILAN NEGERI JAMBI
7	PT MAKASSAR	PENGADILAN NEGERI SIDRAP
8	PT MATARAM	PENGADILAN NEGERI PRAYA
9	PT MEDAN	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
10	PT MEDAN	PENGADILAN NEGERI KISARAN
11	PT MEDAN	PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR
12	PT MEDAN	PENGADILAN NEGERI STABAT
13	PT MEDAN	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
14	PT PADANG	PENGADILAN NEGERI PADANG
15	PT PALU	PENGADILAN NEGERI PALU
16	PT PEKANBARU	PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
17	PT PONTIANAK	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
18	PT SEMARANG	PENGADILAN NEGERI JEPARA
19	PT SURABAYA	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
20	PT SURABAYA	PENGADILAN NEGERI KEDIRI
21	PT SURABAYA	PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI
22	PT TG. KARANG	PENGADILAN NEGERI MENGGALA
23	PT YOGYAKARTA	PENGADILAN NEGERI SLEMAN

**PN YANG SUDAH MENDAPATKAN IJIN MENERAPKAN REGISTER ELEKTRONIK  
PER - DESEMBER 2021**

NO.	PENGADILAN TINGGI	PN	SURAT IJIN PENERAPAN REGISTER ELEKTRONIK	TANGGAL
1	PT TG. KARANG	PN TANJUNG KARANG	114/DJU/HK00.1/1/2019	28-Jan-19
2	PT TG. KARANG	PN GUNUNG SUGIH	114/DJU/HK00.1/1/2019	28-Jan-19
3	PT TG. KARANG	PN SUKADANA	114/DJU/HK00.1/1/2019	28-Jan-19
4	PT TG. KARANG	PN METRO	114/DJU/HK00.1/1/2019	28-Jan-19
5	PT TG. KARANG	PN KALIANDA	114/DJU/HK00.1/1/2019	28-Jan-19
6	PT TG. KARANG	PN KOTA AGUNG	114/DJU/HK00.1/1/2019	28-Jan-19
7	PT PALANGKARAYA	PN PALANGKARAYA	116/DJU/HM.02.3/1/2019	29-Jan-19
8	PT PALANGKARAYA	PN PANGKALAN BUN	114/DJU.3/HM02.3/5/2019	31-May-19
9	PT PALANGKARAYA	PN SAMPIT	130/DJU.3/HM02.3/7/2019	8-Jul-19
10	PT DENPASAR	PN TABANAN	172/DJU.3/HM02.3/9/2019	4-Sep-19
11	PT DENPASAR	PN GIANYAR	115/DJU/HM02.3/1/2019	29-Jan-19
12	PT DENPASAR	PN NEGARA	665/DJU/HM02.3/6/2020	19-Jun-20
13	PT DENPASAR	PN SINGARAJA	115/DJU/HM02.3/1/2019	29-Jan-19
14	PT DENPASAR	PN AMLAPURA	128/DJU/HM02.3/1/2021	22-Jan-21
15	PT DENPASAR	PN DENPASAR	608/DJU/HM.02.3/6/2020	15-Jun-20
16	PT YOGYAKARTA	PN YOGYAKARTA	60/DJU.3/HM02.3/4/2019	1-Apr-19
17	PT YOGYAKARTA	PN BANTUL	501/DJU/HM02.3/5/2020	13-May-20
18	PT SEMARANG	PN WONOSOBO	116/DJU.3/HM02.3/5/2019	31-May-19
19	PT SEMARANG	PN PURWOKERTO	116/DJU.3/HM02.3/5/2019	31-May-19
20	PT SEMARANG	PN KLATEN	116/DJU.3/HM02.3/5/2019	31-May-19
21	PT SEMARANG	PN SRAGEN	1323/DJU/HM.02.3/12/2019	16-Dec-19
22	PT SEMARANG	PN TEMANGGUNG	339/DJU/HM.02.3/3/2021	8-Mar-21
23	PT SEMARANG	PN SALATIGA	116/DJU.3/HM02.3/5/2019	31-May-19
24	PT SEMARANG	PN PURWOREJO	116/DJU.3/HM02.3/5/2019	31-May-19
25	PT SEMARANG	PN PEKALONGAN	1323/DJU/HM.02.3/12/2019	16-Dec-19
26	PT SEMARANG	PN KEBUMEN	116/DJU.3/HM02.3/5/2019	31-May-19
27	PT SEMARANG	PN KAB. SEMARANG DI UNGARAN	1323/DJU/HM.02.3/12/2019	16-Dec-19
28	PT SEMARANG	PN KUDUS	116/DJU.3/HM02.3/5/2019	31-May-19
29	PT SEMARANG	PN PATI	1323/DJU/HM.02.3/12/2019	16-Dec-19
30	PT SEMARANG	PN PURWODADI	1323/DJU/HM.02.3/12/2019	16-Dec-19
31	PT SEMARANG	PN BREBES	982/DJU/HM.02.3/10/2020	12-Oct-19
32	PT SEMARANG	PN SURAKARTA	116/DJU.3/HM02.3/5/2019	31-May-19
33	PT SEMARANG	PN KARANGANYAR	116/DJU.3/HM02.3/5/2019	31-May-19
34	PT SEMARANG	PN BLORA	1323/DJU/HM.02.3/12/2019	16-Dec-19
35	PT SEMARANG	PN KENDAL	1323/DJU/HM.02.3/12/2019	16-Dec-19
36	PT SEMARANG	PN KAB. MAGELANG DI MUNGKID	384/DJU/HM.02.3/4/2020	2-Apr-20
37	PT SEMARANG	PN PEMALANG	1323/DJU/HM.02.3/12/2019	16-Dec-19

NO.	PENGADILAN TINGGI	PENGADILAN NEGERI	SURAT IJIN PENERAPAN REGISTER ELEKTRONIK	TANGGAL
38	PT SEMARANG	PN CILACAP	116/DJU.3/HM02.3/5/2019	31-May-19
39	PT SEMARANG	PN SUKOHARJO	384/DJU/HM.02.3/4/2020	2-Apr-20
40	PT SEMARANG	PN DEMAK	339/DJU/HM.02.3/3/2021	8-Mar-21
41	PT MEDAN	PN GUNUNG SITOLI	689/DJU/PS.01/6/2020	25-Jun-20
42	PT SURABAYA	PN TULUNGAGUNG	1208/DJU/HK00.1/11/2019	8-Nov-19
43	PT SURABAYA	PN MOJOKERTO	1208/DJU/HK00.1/11/2019	8-Nov-19
44	PT SURABAYA	PN BANYUWANGI	982/DJU/HM.02.3/10/2020	12-Oct-19
45	PT SURABAYA	PN BANGIL	1324/DJU/HM.02.3/12/2019	16-Dec-19
46	PT SURABAYA	PN JEMBER	1208/DJU/HK00.1/11/2019	8-Nov-19
47	PT SURABAYA	PN MALANG	1208/DJU/HK00.1/11/2019	8-Nov-19
48	PT SURABAYA	PN PONOROGO	982/DJU/HM.02.3/10/2020	12-Oct-19
49	PT SURABAYA	PN KEPANJEN	1208/DJU/HK00.1/11/2019	8-Nov-19
50	PT SURABAYA	PN BLITAR	1208/DJU/HK00.1/11/2019	8-Nov-19
51	PT SURABAYA	PN LAMONGAN	1208/DJU/HK00.1/11/2019	8-Nov-19
52	PT SURABAYA	PN NGAWI	982/DJU/HM.02.3/10/2020	12-Oct-20
53	PT SURABAYA	PN TUBAN	1208/DJU/HK00.1/11/2019	8-Nov-19
54	PT SURABAYA	PN SURABAYA	1324/DJU/HM.02.3/12/2019	16-Dec-19
55	PT MAKASSAR	PN BULUKUMBA	982/DJU/HM.02.3/10/2020	12-Oct-20
56	PT MAKASSAR	PN POLEWALI	995/DJU/HM.02.3/10/2020	19-Oct-20
57	PT BANGKA BELITUNG	PN PANGKALPINANG	131/DJU.3/HM02.3/7/2019	8-Jul-19
58	PT BANGKA BELITUNG	PN SUNGAI LIAT	117/DJU.3/HM02.3/5/2019	31-May-19
59	PT PALEMBANG	PN SEKAYU	289/DJU.3/HM02.3/3/2020	11-Mar-20
60	PT PALEMBANG	PN LUBUK LINGGAU	426/DJU/HM.02.3/4/2020	16-Apr-20
61	PT PALEMBANG	PN MUARA ENIM	289/DJU.3/HM02.3/3/2020	11-Mar-20
62	PT PALEMBANG	PN PALEMBANG	744/DJU/HM.02.3/7/2020	9-Jul-20
63	PT MANADO	PN KOTAMOBAGU	883/DJU/HM.02.3/8/2020	19-Aug-20
64	PT BANJARMASIN	PN BATULICIN	796/DJU/HM.02.3/7/2020	23-Jul-20
65	PT BANJARMASIN	PN BANJARMASIN	501/DJU/HM02.3/5/2020	13-May-20
66	PT PONTIANAK	PN SINTANG	46/DJU3/HM.02.3/3/2021	4-Mar-21
67	PT PONTIANAK	PN MEMPAWAH	426/DJU/HM.02.3/4/2020	16-Apr-20
68	PT PONTIANAK	PN SINGKAWANG	397/DJU/HM02.3/4/2020	7-Apr-20
69	PT PEKANBARU	PN ROKAN HILIR	1273/DJU/HM.02.3/12/2020	29-Dec-20
70	PT PEKANBARU	PN RENGAT/INDRAGIRI	797/DJU/HM.02.3/7/2020	23-Jul-20
71	PT PEKANBARU	PN PEKANBARU	608/DJU/HM.02.3/6/2020	15-Jun-20
72	PT PEKANBARU	PN BATAM	741/DJU/HM.02.3/7/2020	8-Jul-20
73	PT PEKANBARU	PN SIAK SRI INDRAPURA	612/DJU/HM.02.3/6/2020	17-Jun-20
74	PT BANDUNG	PN BALE BANDUNG	65/DJU/HM.02.3/1/2020	13-Jan-20
75	PT BANDUNG	PN INDRAMAYU	33/DJU/HM.02.3/3/2021	4-Mar-21
76	PT BANDUNG	PN TASIKMALAYA	982/DJU/HM.02.3/10/2020	12-Oct-20
77	PT SAMARINDA	PN KUTAI BARAT	204/DJU/HM02.3/1/2021	27-Jan-21
78	PT SAMARINDA	PN TANJUNG SELOR	1220/DJU/HM.02.3/12/2020	8-Dec-20
79	PT SAMARINDA	PN TANJUNG REDEP	33/DJU/HM.02.3/3/2021	4-Mar-21
80	PT MATARAM	PN SELONG	426/DJU/HM.02.3/4/2020	16-Apr-20
81	PT MATARAM	PN MATARAM	426/DJU/HM.02.3/4/2020	16-Apr-20
82	PT BANTEN	PN TANGERANG	501/DJU/HM02.3/5/2020	13-May-20



**FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN REGISTER ELEKTRONIK PN ..... TAHUN 2021  
PADA PENGADILAN TINGGI .....**

No.	Unsur	Keterangan	Nilai EIS											
			Kelas IA Khusus dan Kelas IA					Kelas IB dan Kelas II					Tindak Lanjut/ Penyelesaian	
			Nilai Maksimal	Tidak Maksimal * (rata-rata trwulan)				Tindak Lanjut/ Penyelesaian	Nilai Maksimal	Tidak Maksimal * (rata-rata trwulan)				
I	II	III		IV	I	II	III			IV				
1	Jumlah Rasio Penanganan Perkara	Rekapitulasi rasio penanganan perkara	80						100					
2	Rilis Versi SIPP	Versi SIPP yang terpasang di satuan kerja	30						25					
3	Kesesuaian Kode Satker Nomor Perkara	Kesesuaian kode satker pada nomor perkara sesuai dengan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014	30						25					
4	Jangka Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk	Waktu pelaksanaan delegasi masuk, maksimal 7 hari kerja	21						8					
5	Pendaftaran Perkara	Kepatuhan pendaftaran perkara dalam waktu 1x24 jam	25						30					
6	Pencatatan Barang Bukti	Kepatuhan pengguna dalam mengisi barang bukti suatu perkara	20						8					
7	Penetapan Hakim	Kepatuhan penetapan majelis/hakim dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari	25						28					
8	Penetapan Panitera Pengganti	Kepatuhan penetapan panitera pengganti dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari	25						28					
9	Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	Kepatuhan penetapan Jurusita dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari	25						28					
10	Penetapan Hari Sidang Pertama	Kepatuhan penetapan Hari Sidang Pertama dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari	25						28					
11	Penginputan Tuntutan	Ketepatan waktu dalam input tuntutan dalam suatu perkara	25						30					
12	Penginputan Putusan Akhir	Ketepatan waktu dalam input putusan dalam suatu perkara	25						30					
13	Penginputan Minutasi	Kepatuhan penginputan minutasi maksimal 1x24 jam	25						30					
14	Minutasi Perkara	Ketepatan waktu dalam melakukan minutasi dalam waktu 7 hari	25						30					
15	Penginputan Permohonan Banding	Kepatuhan waktu dalam input permohonan banding dalam waktu 1x24 jam	20						10					
16	Penginputan Permohonan Kasasi	Kepatuhan waktu dalam input permohonan kasasi dalam waktu 1x24 jam	12						8					
17	Penginputan Permohonan Peninjauan Kembali	Kepatuhan waktu dalam input permohonan peninjauan kembali dalam waktu 1x24 jam	12						8					
18	Pengiriman Berkas Banding	Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu maksimal 30 hari (Perdata) atau 14 hari (Pidana)	20						10					
19	Pengiriman Berkas Kasasi	Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas Kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu maksimal 65 hari	12						8					
20	Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali	Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dalam waktu maksimal 30 hari setelah pemeriksaan persidangan (Pidana) atau 30 hari setelah jawaban/tanggapan atas alasan PK (Perdata)	12						8					
21	Pembertahanan Putusan/ Penetapan	Kepatuhan waktu dalam input tanggal pembertahanan putusan dalam waktu 1x24 jam	20						30					
22	Penginputan penetapan majelis/ hakim	Kepatuhan waktu dalam input penetapan majelis hakim/hakim dalam waktu 1x24 jam	25						28					
23	Penginputan Penetapan Panitera Pengganti	Kepatuhan waktu dalam input penunjukan panitera pengganti dalam waktu 1x24 jam	25						28					
24	Penginputan Penetapan Hari Sidang	Kepatuhan waktu dalam input penetapan hari sidang dalam waktu 1x24 jam	25						28					
25	Penginputan Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	Kepatuhan waktu dalam input penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam waktu 1x24 jam	25						28					
26	E-Document Dakwaan/Pettium	Kelengkapan Dokumen Elektronik dalam pendaftaran perkara (data umum)	20						20					
27	Pencatatan Saksi	Kelengkapan pencatatan data saksi	12						8					
28	Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi	Kepatuhan waktu dalam input Data Pelaksanaan Delegasi dalam waktu 1x24 jam	20						10					
29	Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang	Kepatuhan input penundaan jadwal sidang dalam waktu 1x24 jam	25						28					
30	Penginputan Penetapan Perpanjangan Penahanan	Kepatuhan penginputan Perpanjangan Penahanan maksimal 1x24 jam sejak tanggal penetapan	25						25					
31	Unggah Putusan Akhir	Kepatuhan unggah dokumen putusan akhir maksimal 1x24 jam sejak tanggal putus	25						25					
32	E-Document Tuntutan	Kelengkapan Dokumen Elektronik tuntutan	20						20					
33	E-Document Putusan Akhir / Penetapan	Kelengkapan Dokumen Elektronik Putusan	25						28					
34	Data Laporan Mediasi	Kesesuaian pencatatan tanggal lapor mediasi	20						10					
35	Data Diversi	Kesesuaian pencatatan tanggal lapor diversi	12						8					
36	Data Nilai Sengketa	Kesesuaian pencatatan Nilai Sengketa dalam Perkara Gugatan Sederhana	12						8					
37	Agenda Sidang Terakhir	Kesesuaian Agenda Sidang Terakhir dengan status perkara putus	25						28					
38	Tanggal Putusan dan Tanggal Sidang Terakhir	Kesesuaian Tanggal Sidang Terakhir dengan tanggal putusan	25						30					
39	Publikasi Pihak	Kesesuaian publikasi perkara sesuai SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011	25						30					
40	Pengisian BHT	Ada atau tidaknya pencatatan BHT pada suatu perkara	20						25					
41	Penahanan	Kesesuaian pencatatan penahanan habis sebelum perkara putus	25						25					
42	Sisa Biaya Perkara tk Pertama	Kesesuaian pencatatan pengembalian sisa panjar	25						25					
43	Kesesuaian Sinkronisasi SIPP WEB	Kesesuaian Sinkronisasi SIPP WEB	25						25					

Keterangan :  
\*) Rata - rata 3 bulan setiap unsur nilai EIS